BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia (HAM) bangsa tersebut.¹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

¹ Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, hlm. 65

² Wiki, 2020, *Pernyataan tentang Hak Asasi Manusia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 00:10 WIB

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia.”

Sejarah telah mencatat banyak kasus pelanggaran HAM besar di dunia. Pelanggaran HAM ini melibatkan kekuatan kekuasaan. Banyak tokoh yang terseret dalam kasus pelanggaran HAM saat mereka berkuasa.

1. Rezim Benito Mussolini di Italia
2. Rezim Adolf Hitler di Jerman

Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi.

3. Konflik Israel dan Palestina
4. Perang Sipil di Bosnia
5. Kasus Apartheid di Afrika Selatan
6. Kekerasan Etnis Rohingya Myanmar³

Dalam dunia pekerjaan yakni dalam bidang profesi juga tak luput dari pelanggaran ham yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung seperti kasus Kapten kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Roosevelt,

³ Sindo News, 2019, *Kasus Pelanggaran HAM Besar Internasional*, <https://international.sindonews.com/berita/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 00:20 WIB

Brett Crozier, dilaporkan terinfeksi virus Corona dan dia dipecat karena memperingatkan atasannya akan bahaya Corona yang mengancam 5.000 anggotanya.

Otoritas angkatan laut Amerika Serikat menganggap kapten kapal USS Theodore Roosevelt tersebut telah melanggar kode etik angkatan laut, dan pemecatan yang dia dapatkan sesuai dengan pelanggarannya.⁴

Hal diatas tentu dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh otoritas angkatan laut Amerika Serikat telah merenggut hak asasi dari kapten kapal tersebut dimana ia berusaha menyelamatkan 5.000 anggotanya agar selamat dari virus corona. padahal sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh kapten kapal tersebut termasuk hak asasinya sebagaimana hal ini disebutkan dalam *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 atau disingkat (UDHR 1948) tepatnya pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

(Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memegang pendapat tanpa campur tangan dan

⁴ Tempo, 2020, *Ingatkan Risiko Virus Corona, Kapal Induk AS Dipecat dan Positif*, <https://dunia.tempo.co/read/1328505/ingatkan-risiko-corona-kapten-kapal-induk-as-dipecat-dan-positif>, diakses pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 00:30 WIB

untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas).

Hal ini diperkuat dengan berlandaskan pada Pasal 1 UDHR 1948 yang berbunyi:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

(Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dan Berekspresi Dalam Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia” (Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh Amerika Serikat).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi dalam Hukum HAM Internasional?
2. Bagaimanakah Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hak Asasi Manusia Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi dalam Hukum HAM Internasional.
2. Untuk Mengetahui Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

1) *Universal Declaration of Human Rights 1948*

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- 3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan

literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁷

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁸

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

⁸ Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10